



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GOWA



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2021**



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>	
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I PENDAHULUAN.....	1	
1.1 DASAR HUKUM.....	1	
1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA.....	7	
1.2.1 VISI KABUPATEN GOWA.....	7	
1.2.2 MISI KABUPATEN GOWA.....	9	
1.3 DATA UMUM DAERAH.....	10	
1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	10	
1.3.2 GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN.....	11	
1.3.3 GAMBARAN UMUM JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)..	12	
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15	
2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	15	
2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	19	
2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	20	
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	21	
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21	
3.1.1 URUSAN KONKRUEN.....	21	
3.1.2 RINGKASAN URUSAN PILIHAN.....	86	
3.1.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH....	99	
3.1.4 RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.....	126	
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	128	
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA.....	131	
BAB IV CAPAIAN KINERA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	134	
4.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA.....	134	
4.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA.....	137	
4.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	137	
BAB V PENUTUP.....	138	



BUPATI GOWA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiqnya semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gowa, termasuk dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa ini merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun 2021 ini merupakan suatu kewajiban konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas - tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program pencerahan qolbu jum'at ibadah tetap terlaksana, program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim putra putri terbaik kita untuk disekolahkan dengan dibiayai oleh pemerintah.



Akhirnya kami menyadari sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat lebih maju dan lebih berhasil.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungguminasa, Maret 2022

BUPATI GOWA,

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 DASAR HUKUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntunan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan



terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”.

Atas dasar tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun 2021 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2021.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah antara lain :

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

Dasar hukum terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa yang merupakan turunan dari Undang - undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar.

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ditetapkan undang - undang yang berisikan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas.

Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang akuntabel di hadapan masyarakat.

3. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam undang - undang ini, meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyusunan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyesuaian anggaran.

Belanja Daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program, kegiatan dan jenis belanja. Hal ini berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Undang - Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi negara dengan maksud untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga antara kewenangan dan dana yang diperlukan dapat digunakan dengan sebaik - baiknya untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan di daerah.

5. UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dilakukan oleh BPK yang meliputi seluruh unsur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti antara lain melalui pembahasan bersama dengan pihak terkait.

6. UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu



diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

7. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Undang - Undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam rangka mengembangkan mekanisme **checks and balances** antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra yang sejajar demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maka laporan pertanggungjawaban tersebut sifatnya berubah menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 366 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”*.

Laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut sifatnya sebagai suatu **progress report**, yang tidak membawa implikasi pemberhentian Kepala Daerah.

8. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Otonomi daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap daerah.



13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan ini memuat sistematika dan tata cara penyusunan dan pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah secara rinci dan sistematis. Memuat dasar hukum penyusunan, visi misi kepala daerah serta data umum wilayah Kabupaten Gowa termasuk juga data capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi atas permasalahan tersebut.

14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.

16. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 - 2021



Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2021 - 2026.

17. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.

18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2021.

1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

1.2.1 VISI KABUPATEN GOWA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi



sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan **“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Seajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan terakhir periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010, 2010-2015, 2016-2021). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode ketiga ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2021-2026.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”** dan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisalisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun **Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026** yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:

Visi di atas memiliki tiga pokok visi, yaitu:

1. **Masyarakat yang Unggul** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif. Kondisi tersebut



ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran.

2. **Masyarakat yang Tangguh** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
3. **Tata kelola pemerintahan Terbaik** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Opini BPK terhadap laporan keuangan.

1.2.2 MISI KABUPATEN GOWA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.



Misi “Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;



- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

1.3.2 GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN

Letak wilayah administrasi tersebut menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 763.387 jiwa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk tercatat sebanyak 768.868 jiwa yang terdiri dari 380.564 jiwa penduduk laki-laki, dan 388.304 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 96,96 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2021 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 397 jiwa/km². Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Adapun data penduduk Kabupaten Gowa pada periode tahun 2020 - 2021 secara terinci dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Data Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2020 – 2021

RINCIAN	2020	2021
1. Jumlah Penduduk	763.387	768.868
a. Laki-laki (jiwa)	378.413	380.564
b. Perempuan (jiwa)	384.974	388.304
2. Kepadatan/Km ² (Jiwa/Km ²)	397	397
3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/RT)	4	4

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Gowa, 2021.

Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran



dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin dan seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar.

Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar** membuat keduanya diangkat oleh negara sebagai Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.3.3 GAMBARAN UMUM JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pegawai merupakan sumber daya utama dalam suatu organisasi, mereka dituntut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada kinerja setiap pegawainya. Keberhasilannya berasal dari proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja pegawai, maka proses kerja dapat dilihat dari baik tidaknya setiap pegawai melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap pegawai dan hasil kerjanya masing-masing.

Dalam rangka Peningkatan mutu dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, efisien dan memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik sangat populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat sebagai subjek pelayanan tidak ingin lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang berbelit-belit.

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah membentuk susunan perangkat daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Staf Ahli; Sekretariat Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Inspektorat Daerah; 25 (dua puluh lima) Dinas, dan 6 (enam) Badan serta ditambah dengan 18 (delapan belas) Pemerintahan Kecamatan.

Sesuai perangkat daerah yang telah dibentuk maka disesuaikan dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 6.925 Orang, dari jumlah tersebut terbagi atas beberapa Perangkat Daerah yang terdiri dari tenaga Teknis, Tenaga Fungsional Pendidik, Tenaga Fungsional Kesehatan dan Fungsional tertentu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021.

NO	SKPD	JUMLAH PNS
1	DINAS PENDIDIKAN	3770
2	DINAS KESEHATAN	900
3	RSUD SYECH YUSUF	462
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	112
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	31
6	SATPOL PP	48
7	DINAS SOSIAL	29
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	15
9	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	35
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	15
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	28
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34
13	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	32
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	19
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	34
16	DINAS PERHUBUNGAN	61
17	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK PERSANDIAN	37
18	DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENEGAH	16
19	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	30
20	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	28
21	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	17
22	DINAS PERIKANAN	28
23	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	34
24	DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA	114
25	DINAS PETERNAKAN & PERKEBUNAN	60
26	DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN	38
27	SEKRETARIAT DAERAH	119
28	SEKRETARIAT DPRD	36
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16
30	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	13
31	INSPEKTORAT DAERAH	52
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	54
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	39
35	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	40
36	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	15
37	KECAMATAN SOMBA OPU	85
38	KECAMATAN PALLANGGA	43
39	KECAMATAN BAJENG	36
40	KECAMATAN BONTONOMPO	34
41	KECAMATAN BONTO MARANNU	35



Pendahuluan

42	KECAMATAN PARANGLOE	27
43	KECAMATAN TINGGIMONCONG	31
44	KECAMATAN BUNGAYA	22
45	KECAMATAN TOMPO BULU	19
46	KECAMATAN BIRING BULU	23
47	KECAMATAN TOMBOLO PAO	18
48	KECAMATAN BAROMBONG	25
49	KECAMATAN PATTALLASSANG	17
50	KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	21
51	KECAMATAN BONTOLEMPANGAN	14
52	KECAMATAN BAJENG BARAT	13
53	KECAMATAN PARIGI	11
54	KECAMATAN MANUJU	15
JUMLAH		6925

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Gowa Tahun 2021

Pegawai Negeri Sipil mayoritas pada Dinas Pendidikan dimana terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dari tenaga Struktural dan Fungsional yang terdiri dari Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, Guru, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah. Setelah itu terbanyak pada Dinas Kesehatan dimana terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dari tenaga Struktural dan Fungsional tertentu yang tersebar pada setiap Puskesmas Se Kabupaten Gowa. Kemudian dari Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang juga terdiri dari tenaga Struktural dan Fungsional tertentu dokter dan Perawat. Selain itu juga terdapat tenaga Struktural dan Fungsional Dari Organisasi Perangkat Daerah Badan dan Dinas serta 18 Kantor Kecamatan pada Kabupaten Gowa yang terdiri dari 46 Kelurahan.



BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-



benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat. Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari penerimaan daerah berupa pajak daerah.

Dalam strategi pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya antara lain intensifikasi pungutan dan retribusi oleh unit-unit kerja pengelola PAD tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan kinerja Holding Company dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2021 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.854.081.087.633,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.872.136.404.847,22 atau sebesar 100,97 persen yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp.232.504.180.420,00 telah terealisasi sebesar Rp.256.759.755.064,22 atau 110,43 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.117.579.635.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.918.488.887,50 atau 113,90 persen.
 - Retribusi Daerah dengan target sebesar Rp.51.131.043.203,00 dengan realisasi sebesar Rp.49.614.791.303,25 atau 97,03 persen.



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.5.020.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.069.728.564,00 atau 81,07 persen.
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.58.773.501.787,00 dengan realisasi sebesar Rp.69.156.746.309,47 atau 117,67 persen.
- b. Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp.1.506.990.886.470,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.504.212.221.783,00 atau 99,82 persen, dengan perincian sebagai berikut :
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dari target Rp.1.415.008.115.014,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.411.479.987.069,00 atau 99,75 persen.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah, dari target Rp.91.982.771.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.92.732.234.714,00 atau 100,81 persen.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp.114.586.020.743,00 dengan realisasi sebesar Rp.111.164.428.000,00 atau 97,01 persen, dengan perincian sebagai berikut :
- Pendapatan Hibah, dari target Rp.24.057.068.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.24.057.068.000,00 atau 100 persen.
 - Lain - lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dari target Rp.90.528.952.743,00 dengan realisasi sebesar Rp.87.107.360.000,00 atau 96,22 persen.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Dalam Rupiah)

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1 Pendapatan Asli Daerah	232.504.180.420,00	256.759.755.064,22	100,97
1.1 Pajak Daerah	117.579.635.430,00	133.918.488.887,50	113,90
1.2 Retribusi Daerah	51.131.043.203,00	49.614.791.303,25	97,03
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.020.000.000,00	4.069.728.564,00	81,07
1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	58.773.501.787,00	69.156.746.309,47	117,67
2 Pendapatan Transfer	1.506.990.886.470,00	1.504.212.221.783,00	99,82
2.1 Transfer Pemerintah Pusat	1.415.008.115.014,00	1.411.479.987.069,00	99,75
2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	91.982.771.456,00	92.732.234.714,00	100,81
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	114.586.020.743,00	111.164.428.000,00	97,01
3.1 Pendapatan Hibah	24.057.068.000,00	24.057.068.000,00	100
3.2 Lain-lain Pendapatan	90.528.952.743,00	87.107.360.000,00	96,22
Jumlah	1.854.081.087.633,00	1.872.136.404.847,22	100,97

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2021.



3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Rasio sarana dan prasarana operasional pendataan dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai.
b. Kemampuan SDM pengelola PAD, khususnya BUMD masih perlu ditingkatkan.

Dengan segenap daya dan upaya, realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan, yakni pada tahun 2020 sebesar Rp.241.470.327.965,34 menjadi Rp.256.759.755.064,22 pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.15.289.427.098,88 atau 5,95 persen. Untuk tahun anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.232.504.180.420,00 terealisasi sebesar Rp. 256.759.755.064,22 atau sebesar 110,43 persen.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa, Tahun 2021 (dalam Rupiah)

Table with 5 columns: NO, TAHUN, TARGET, REALISASI, %. Row 1: 1, 2021, 232.504.180.420,00, 256.759.755.064,22, 110,43

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2021.

Khusus untuk kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode 2020-2021 memperoleh hasil yang cukup menggembirakan, yaitu pada tahun 2020 yang targetnya sebesar Rp. 13.379.635.430,00, dapat terealisasi sebesar Rp. 14.841.128.860,00 atau sebesar 110,92 persen, sedangkan pada tahun 2021 dengan perencanaan target sebesar Rp. 15.379.635.430,00, dapat terealisasi sebesar Rp. 17.807.181.048,00 atau sebesar 115,78 persen.

Dengan demikian pada kurun tahun 2020-2021 telah berhasil mencapai target diatas seratus persen Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gowa, Tahun 2020-2021 (dalam Rupiah)

Table with 5 columns: No, TAHUN, TARGET, REALISASI, %. Rows: 1 (2020: 13.379.635.430,00 / 14.841.128.860,00 / 110,92), 2 (2021: 15.379.635.430,00 / 17.807.181.048,00 / 115,78)

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2021.



2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2020 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

2. Target dan Realisasi Belanja

• Belanja

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.2.223.019.356.393,95 dan terealisasi sebesar Rp.1.799.858.544.933,58 atau 80,96 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 1.341.163.957.966,87 yang terealisasi sebesar Rp. 1.227.599.778.183,08 atau 91,53 persen dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2021 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 648.468.552.981,08 dengan realisasi sebesar Rp. 340.906.332.049,501 atau 52,57 persen dari yang dianggarkan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.421.422.832 atau 56,86 persen dari yang dianggarkan.

d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 230.886.845.446,00 dengan realisasi sebesar Rp. 229.931.011.869,00 atau 99,59 persen dari yang dianggarkan.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 (Dalam Rupiah)

Table with 4 columns: URAIAN, TARGET, REALISASI, and %. It lists various expenditure categories like Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, and Belanja Bantuan Sosial with their respective target and actual values.



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.	Belanja Modal	648.468.552.981,08	340.906.332.049,50	52,57
2.1	Belanja Modal Tanah	7.987.687.000,00	7.887.332.049,50	98,86
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.354.920.489,00	75.958.584.485,69	74,94
2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	175.179.378.984,00	149.782.842.330,73	85,50
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	351.472.558.460,08	98.932.813.160,35	28,15
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.483.008.048,00	8.344.478.531,73	66,85
3.	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	1.421.422.832,00	56,86
4.	Transfer	230.886.845.446,00	229.931.011.869,00	99,59
4.1	Belanja Bagi Hasil	1.675.443.700,00	1.068.106.323,00	63,75
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	229.211.401.746,00	228.862.905.546,00	99,85
	Jumlah	2.223.019.356.393,95	1.799.858.544.933,58	80,96

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2021.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Aturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.
- Kurang dan terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai bidang akuntansi terutama dalam pengelolaan keuangan untuk tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/belanja.

Solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan dapat berlaku lama.
- Merekrut sumber daya manusia yang menguasai bidang akuntansi, memberikan pelatihan dan atau pendidikan formal bidang pengelolaan keuangan daerah secara umum dan akuntansi secara khusus.

2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Adapun pembiayaan pada Tahun Anggaran 2021 terdiri atas Penerimaan Daerah atas pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.382.658.119.206,00 yang mana dapat terealisasi sebesar Rp.149.148.119.206,00 atau 38,98 persen dari target yang direncanakan, sedangkan Pengeluaran Daerah atas pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.13.719.850.444,00 dan terealisasi Rp. 5.000.000.000,00 atau 36,44 persen.



BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 URUSAN KONKRUEAN

1. RINGKASAN URUSAN WAJIB

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib dibedakan atas dua, yakni urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu fokus pelaksanaan pembangunan dalam mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Gowa.

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah organisasi perangkat daerah/instansi yang melaksanakan urusan pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3.770 orang termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pendidikan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.127.016.500,- dan terealisasi sebesar Rp.126.839.000,- atau 99,86% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.588.730.616,- dan terealisasi sebesar Rp.564.704.400,- atau 95,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.466.584.366,- dan terealisasi sebesar Rp.443.639.200,- atau 95,08% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.122.146.250,- dan terealisasi sebesar Rp.121.065.200,- atau 99,11% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.51.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.714.500,- atau 96,07% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.540.760.880,- dan terealisasi sebesar Rp.1.246.285.878,- atau 80,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.857.750,- dengan realisasi 100 % dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.356.846.380,- dan terealisasi sebesar Rp.332.097.763,- atau % dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.255.000,- dengan realisasi 100 % dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.126.801.750,- dan terealisasi sebesar Rp.857.075.615,- atau % dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.72.477.141,- dan terealisasi sebesar Rp.72.475.700,- atau 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.81.605.760,- dan terealisasi sebesar Rp.72.317.680,- atau 88,62% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.431.788.050,- dan terealisasi sebesar Rp.115.465.391,- atau 26,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.374.866.050,- dan terealisasi sebesar Rp.58.543.391,- atau 15,62% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.810.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.112.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



h. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.120.236.674.917,00 dan terealisasi sebesar Rp.113.976.315.969,85 atau 94,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.521.000,- dan terealisasi sebesar Rp.68.936.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.736.988.000,- dan terealisasi sebesar Rp.734.136.100,- atau 99,61% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.421.841.000,- dan terealisasi sebesar Rp.419.779.000,- atau 99,51% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.360.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.399.341.566,- atau 87,24% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.995.023.700,- atau 90,46% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.202.000,- dan terealisasi sebesar Rp.309.068.500,- atau 97,74% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.825.139.000,- dan terealisasi sebesar Rp.678.991.400,- atau 82,29% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.911.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.828.496.000,- atau 98,80% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134.867.285,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.166.488,- dan terealisasi sebesar Rp.17.506.000,- atau 75,57% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.337.750.144,- dan terealisasi sebesar Rp.90.525.037.703,85 atau 95,96% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

i. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.905.764.538,- dan terealisasi sebesar Rp.9.902.672.130,67 atau 90,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.991.078.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.842.614.744,67 atau 97,52% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.333.000,- dan terealisasi sebesar Rp.261.540.000,- atau 98,57% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.328.000,- dan terealisasi sebesar Rp.199.548.800,- atau 70,93% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.947.307.000,- dan terealisasi sebesar Rp.940.381.000,- atau 99,27% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.621.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.618.567.900,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.540.538,- dan terealisasi sebesar Rp.35.700.000,- atau 62,04% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.379.166.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.920.000,- atau 55,36% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.362.852.000,- dan terealisasi sebesar Rp.794.399.686,- atau 58,29% dari alokasi anggaran.

j. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.562.562.800,- dan terealisasi sebesar Rp.5.369.670.936,- atau 96,53% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.978.898.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Perlengkapan PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.660.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.658.364.998,- atau 99,75% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.639.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.548.100.000,- atau 85,69% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.242.464.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.142.707.138,- atau 91,97% dari alokasi anggaran.

k. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.421.425.875,- dan terealisasi sebesar Rp.302.315.399,- atau 71,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.173.225.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.000.000,- atau 39,83% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.270.875,- dan terealisasi sebesar Rp.33.635.399,- atau 90,25% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.730.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.139.950.000,- atau 92,56% dari alokasi anggaran.

l. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.676.014.725,- dan terealisasi sebesar Rp.2.587.057.250,- atau 96,68% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. URUSAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan juga merupakan salah satu fokus dan indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari tingginya Angka Harapan Hidup Masyarakat. Kabupaten Gowa yang sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan program Kesehatan Gratis berupaya untuk terus mensejahterakan masyarakat Gowa.



• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah instansi yang disertai tugas menangani urusan kesehatan telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.362 orang termasuk tenaga kesehatan di 28 puskesmas dengan 38 jabatan struktural yang diisi oleh 38 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan kesehatan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.140.245.000,- dan terealisasi sebesar Rp.136.996.375,- atau 97,68% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.481.000,- dan terealisasi sebesar Rp.107.022.625,- atau 98,66% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.306.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.458.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.667.750,- atau 93,23% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.214.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp.190.832.000,- atau 89,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.211.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.187.880.000,- atau 88,96% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.952.000,- atau 99,73% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.952.000,- atau 99,73% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.120.840,- dan terealisasi sebesar Rp.5.900.000,- atau 48,68% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.940.840,- dan terealisasi sebesar Rp.5.900.000,- atau 99,31% dari alokasi anggaran.
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.180.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.408.957.232,- dan terealisasi sebesar Rp.2.235.283.435,- atau 92,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.861.175,- dan terealisasi sebesar Rp.70.855.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.464.506,- dan terealisasi sebesar Rp.209.266.876,- atau 97,12% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.589.476.209,- dan terealisasi sebesar Rp.586.983.320,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.836.820,- dan terealisasi sebesar Rp.14.471.005,- atau 97,53% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.640.184.522,- dan terealisasi sebesar Rp.632.250.065,- atau 98,76% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.554.500,- atau 97,53% dari alokasi anggaran.
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.898.000,- atau 79,08% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.857.734.000,- dan terealisasi sebesar Rp.702.004.669,- atau 81,84% dari alokasi anggaran.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.105.548.300,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Mebel.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.160.636.946,- dan terealisasi sebesar Rp.4.853.129.107,- atau 94,04% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.000.000,- atau 79,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.876.055.072,- dan terealisasi sebesar Rp.1.744.800.336,- atau 93,00% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.278.321.874,- dan terealisasi sebesar Rp.3.103.328.771,- atau 94,66% dari alokasi anggaran.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.892.909.543,- dan terealisasi sebesar Rp.759.903.737,- atau 85,10% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.916.683,- dan terealisasi sebesar Rp.22.470.729,- atau 83,48% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.361.860,- dan terealisasi sebesar Rp.139.238.208,- atau 85,76% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.596.000,- dan terealisasi sebesar Rp.161.286.000,- atau 60,73% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.733.000,- atau 86,00% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.436.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp.435.175.800,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.

i. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.159.153.267.454,- dan terealisasi sebesar Rp.134.869.707.526,06 atau 84,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.131.676.700,- dan terealisasi sebesar Rp.29.665.806.450,- atau 98,45% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.515.524.500,- dan terealisasi sebesar Rp.37.122.883.938,- atau 96,38% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.837.674.556,- dan terealisasi sebesar Rp.2.794.447.000,- atau 98,48% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.584.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.496.636.880,06 atau 97,55% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.808.793.845,- dan terealisasi sebesar Rp.13.595.701.983,- atau 91,81% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.583.344.882,- dan terealisasi sebesar Rp.34.357.526.203,- atau 67,92% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Obat, Vaksin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.593.500.422,- dan terealisasi sebesar Rp.2.650.740.873,- atau 73,76% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Bahan Habis Pakai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.126.939.549,- dan terealisasi sebesar Rp.10.573.989.848,- atau 74,85% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.526.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.391.808.351,- atau 74,42% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.170.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.134.300.000,- atau 79,00% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.274.913.000,- dan terealisasi sebesar Rp.85.866.000,- atau 31,23% dari alokasi anggaran.

j. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.182.712.656.191,- dan terealisasi sebesar Rp.163.889.736.426,- atau 89,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.033.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.436.440.900,- atau 60,41% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.526.326.000,- dan terealisasi sebesar Rp.310.071.364,- atau 58,91% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.549.900,- dan terealisasi sebesar Rp.11.189.400,- atau 11,35% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.264.000,- atau 92,10% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.262.555.081,- dan terealisasi sebesar Rp.10.658.014.753,- atau 94,63% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.669.010.834,- dan terealisasi sebesar Rp.129.096.875.556,- atau 94,46% dari alokasi anggaran.
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.217.015.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.129.520.167,- atau 92,81% dari alokasi anggaran.
- Operasional Pelayanan Puskesmas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.954.086.376,- dan terealisasi sebesar Rp.19.842.376.786,- atau 73,62% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.947.148.000,- dan terealisasi sebesar Rp.400.983.500,- atau 20,59% dari alokasi anggaran.

k. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.177.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.

l. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.196.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.780.000,- atau 17,18% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

m. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.87.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.241.000,- atau 34,42% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

n. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.97.745.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.090.320,- atau 18,51% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

o. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.49.273.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

p. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.939.115.723,- dan terealisasi sebesar Rp.395.888.468,- atau 42,16% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

q. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.293.470.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.167.241,- atau 71,27% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa adalah instansi yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 112 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat terwujud.



• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.131.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp.120.101.000,- atau 91,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.606.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.840.000,- atau 83,74% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.85.261.000,- atau 94,63% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.419.479.164,- dan terealisasi sebesar Rp.380.421.164,- atau 90,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.429.164,- dan terealisasi sebesar Rp.232.929.164,- atau 96,08% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.177.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.147.492.000,- atau 83,31% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.215.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp.184.374.400,- atau 85,42% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.176.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.172.374.400,- atau 97,72% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.445.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.000.000,- atau 30,42% dari alokasi anggaran.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.908.976.480,- dan terealisasi sebesar Rp.1.458.206.181,- atau 76,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.428.732,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.311.891.748,- dan terealisasi sebesar Rp.308.902.000,- atau 99,04% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.780.000,- atau 69,56% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.348.656.000,- dan terealisasi sebesar Rp.916.095.449,- atau 67,93% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.194.324.371,- dan terealisasi sebesar Rp.228.539.813,- atau 19,14% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.148.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.103.092.213,- atau 69,56% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Alat Besar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.920.000.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.124.371,- dan terealisasi sebesar Rp.125.447.600,- atau 99,46% dari alokasi anggaran.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.375.747.498,- dan terealisasi sebesar Rp.280.776.254,- atau 74,72% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.269.330.560,- dan terealisasi sebesar Rp.179.774.772,- atau 66,75% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.041.482,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.375.456,- dan terealisasi sebesar Rp.90.960.000,- atau 94,38% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.978.512.690,- dan terealisasi sebesar Rp.893.624.464,- atau 91,32% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.262.899.634,- dan terealisasi sebesar Rp.248.902.724,- atau 94,68% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.610.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.424.060,- atau 41,68% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.181.437.600,- dan terealisasi sebesar Rp.127.726.900,- atau 70,40% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.480.615.456,- dan terealisasi sebesar Rp.476.620.780,- atau 99,17% dari alokasi anggaran.

h. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.042.236.244,- dan terealisasi sebesar Rp.1.963.550.440,- atau 96,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Rehabilitasi Tanggul Sungai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.168.686.178,- dan terealisasi sebesar Rp.167.847.378,- atau 99,50% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.204.328.846,- dan terealisasi sebesar Rp.202.724.512,- atau 99,21% dari alokasi anggaran.
- Normalisasi/Restorasi Sungai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.532.714.518,- dan terealisasi sebesar Rp.1.468.480.860,- atau 95,81% dari alokasi anggaran.
- Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.390.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.145.631,- dan terealisasi sebesar Rp.59.184.631,- atau 85,59% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.971.071,- dan terealisasi sebesar Rp.35.923.059,- atau 94,61% dari alokasi anggaran.

i. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.350.357.619,- dan terealisasi sebesar Rp.14.038.734.106,35 atau 72,55% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.140.483.618,- dan terealisasi sebesar Rp.2.098.268.690,- atau 98,03% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Bendung Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.334.889.895,- dan terealisasi sebesar Rp.1.056.820.542,- atau 79,17% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.240.055.110,- dan terealisasi sebesar Rp.235.790.264,- atau 98,22% dari alokasi anggaran.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.878.751.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.298.495.562,35 atau 69,22% dari alokasi anggaran.
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.746.470.496,- dan terealisasi sebesar Rp.339.653.048,- atau 45,50% dari alokasi anggaran.
- Operasional Unit Pengelola Irigasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.707.500,- dan terealisasi sebesar Rp.9.706.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

j. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.438.441.000,- dan terealisasi sebesar Rp.336.601.329,- atau 76,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.421.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.387.900,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.138.000,- dan terealisasi sebesar Rp.79.082.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.310.882.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.131.429,- atau 67,27% dari alokasi anggaran.



k. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.082.847.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

l. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.675.260.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.

m. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.428.320.621,- dan terealisasi sebesar Rp.2.741.408.565,- atau 112,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.329.511.306,- dan terealisasi sebesar Rp.2.642.599.250,- atau 113,44% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.98.809.315,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

n. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.52.855.482.225,- dan terealisasi sebesar Rp.38.486.768.429,50 atau 72,82% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

o. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.958.238.496,- dan terealisasi sebesar Rp.2.791.530.150,- atau 70,52% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.126.120.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penataan Bangunan dan Lingkungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.832.117.996,- dan terealisasi sebesar Rp.2.665.409.650,- atau 69,55% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

p. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.302.235.459.020,- dan terealisasi sebesar Rp.76.853.527.226,- atau 25,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.942.612.750,- dan terealisasi sebesar Rp.972.796.000,- atau 33,06% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.279.885.543.955,- dan terealisasi sebesar Rp.67.069.698.416,- atau 23,96% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.399.956.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.399.892.500,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.921.262.310,- dan terealisasi sebesar Rp.5.341.393.003,- atau 33,55% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.290.062.208,- dan terealisasi sebesar Rp.289.644.310,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.741.521.297,- dan terealisasi sebesar Rp.1.725.602.997,- atau 99,09% dari alokasi anggaran.

q. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.103.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.148.672,- atau 96,39% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

r. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.219.983.400,- dan terealisasi sebesar Rp.189.209.400,- atau 86,01% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.759.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.987.750,- dan terealisasi sebesar Rp.89.213.750,- atau 74,35% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.236.150,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

s. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.265.701.686,- dan terealisasi sebesar Rp.1.032.254.525,- atau 81,56% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.921.661.137,- dan terealisasi sebesar Rp.859.838.500,- atau 93,29% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.160.929.856,- dan terealisasi sebesar Rp.106.312.400,- atau 66,06% dari alokasi anggaran.
- Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.063.443,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.047.250,- dan terealisasi sebesar Rp.66.103.625,- atau 95,74% dari alokasi anggaran.

t. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.133.472.627,- dan terealisasi sebesar Rp.94.812.586,- atau 71,04% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.873.977,- dan terealisasi sebesar Rp.25.221.900,- atau 74,46% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.598.650,- dan terealisasi sebesar Rp.69.590.686,- atau 69,87% dari alokasi anggaran.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan urusan yang mempunyai peranan penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan peruntukkan lahan yang berwawasan lingkungan, nyaman, sehat dan aman.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.921.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.895.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.198.108.180,- dan terealisasi sebesar Rp.174.492.000,- atau 88,08% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.731.180,- dan terealisasi sebesar Rp.730.000,- atau 99,84% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.193.777.000,- dan terealisasi sebesar Rp.170.162.000,- atau 87,81% dari alokasi anggaran.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55.570.190,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.308.534.161,- dan terealisasi sebesar Rp.300.013.219,- atau 97,24% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.956.560,- dan terealisasi sebesar Rp.46.158.065,- atau 85,55% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.254.577.601,- dan terealisasi sebesar Rp.253.855.154,- atau 99,72% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.993.830,- dan terealisasi sebesar Rp.82.878.000,- atau 96,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.74.583.830,- dan terealisasi sebesar Rp.72.563.000,- atau 97,29% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.315.000,- atau 90,40% dari alokasi anggaran.

g. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.649.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

h. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.61.657.606,92 dan terealisasi sebesar Rp.60.657.500,- atau 98,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.157.606,92 dan terealisasi sebesar Rp.53.157.500,- atau 98,15% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.447.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.



j. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.134.922.756,08 dan terealisasi sebesar Rp.134.754.000,- atau 99,87% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh.

5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sebelumnya merupakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum dan administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran adalah organisasi pelaksana urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 79 orang dengan 29 jabatan struktural yang diisi oleh 29 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.868.750,- dan terealisasi sebesar Rp.57.245.750,- atau 94,05% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.207.750,- dan terealisasi sebesar Rp.44.585.750,- atau 92,49% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.661.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.660.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.637.000,- atau 61,74% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.800.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp.35.637.000,- atau 91,56% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.176.995.000,- dan terealisasi sebesar Rp.176.244.670,- atau 99,58% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp.161.072.670,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp.15.172.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.212.474.841,- dan terealisasi sebesar Rp.1.149.322.126,- atau 94,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.640.630,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.529.075,- dan terealisasi sebesar Rp.90.267.900,- atau 98,62% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.303.212,- dan terealisasi sebesar Rp.17.229.659,- atau 94,13% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.609.924,- dan terealisasi sebesar Rp.71.588.805,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.698.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.398.000,- atau 98,68% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.620.000,- atau 80,45% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.059.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.080.250,- atau 69,47% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.945.435.000,- dan terealisasi sebesar Rp.902.496.882,- atau 95,46% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.106.726.810,- dan terealisasi sebesar Rp.106.507.100,- atau 99,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.944.040,- dan terealisasi sebesar Rp.8.943.900,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.67.519.350,- dan terealisasi sebesar Rp.67.300.000,- atau 99,68% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.263.420,- dan terealisasi sebesar Rp.12.263.200,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.386.716.041,- dan terealisasi sebesar Rp.366.457.050,- atau 94,76% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.456.041,- dan terealisasi sebesar Rp.60.497.050,- atau 85,86% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.316.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp.305.960.000,- atau 96,74% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.892.104.278,- dan terealisasi sebesar Rp.873.687.792,- atau 97,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.141.655.900,- dan terealisasi sebesar Rp.134.082.030,- atau 94,65% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.543.258.628,- dan terealisasi sebesar Rp.533.644.012,- atau 98,23% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.586.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.187.603.250,- dan terealisasi sebesar Rp.186.375.250,- atau 99,35% dari alokasi anggaran.
- h. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.918.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.848.424.000,- atau 99,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.569.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.503.305.000,- atau 99,13% dari alokasi anggaran.
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.178.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp.175.919.000,- atau 98,54% dari alokasi anggaran.
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.171.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.169.200.000,- atau 98,95% dari alokasi anggaran.
- i. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.205.000,- atau 83,07% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
- j. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.957.327.999,- dan terealisasi sebesar Rp.493.559.747,- atau 1,98% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- k. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.300.000,- atau 65,00% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.



l. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.55.702.000,- atau 91,62% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

m. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.516.298.120,- dan terealisasi sebesar Rp.1.492.895.000,- atau 98,46% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.490.873.800,- dan terealisasi sebesar Rp.1.467.663.000,- atau 98,44% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.424.320,- dan terealisasi sebesar Rp.25.232.000,- atau 99,24% dari alokasi anggaran.

n. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.110.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.

6. URUSAN SOSIAL

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Sosial Kabupaten Gowa sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Sosial telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Sosial Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 29 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.900.000,- atau 82,50% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp.50.198.000,- atau 99,76% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.56.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.710.000,- atau 85,91% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.587.014.891,- dan terealisasi sebesar Rp.535.261.236,- atau 91,18% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.061.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.480.005,- dan terealisasi sebesar Rp.9.479.995,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.587.078,- dan terealisasi sebesar Rp.48.987.078,- atau 93,15% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.217.808,- dan terealisasi sebesar Rp.142.399.525,- atau 91,15% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.980.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.28.177.100,- atau 45,26% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.282.419.000,- dan terealisasi sebesar Rp.282.176.538,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.99.732.899,- dan terealisasi sebesar Rp.99.680.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Mebel.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.475.222.626,- dan terealisasi sebesar Rp.457.092.930,- atau 96,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.280.506,- dan terealisasi sebesar Rp.13.477.400,- atau 73,73% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.456.942.120,- dan terealisasi sebesar Rp.443.615.530,- atau 97,08% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.120.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp.99.395.305,- atau 82,78% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.975.000,- dan terealisasi sebesar Rp.88.040.305,- atau 90,79% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.355.000,- atau 49,16% dari alokasi anggaran.

h. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.87.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.86.900.000,- atau 98,97% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

i. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.125.387.500,- dan terealisasi sebesar Rp.114.875.000,- atau 91,62% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Permakanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.500.000,- atau 96,43% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Alat Bantu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.250.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.837.500,- dan terealisasi sebesar Rp.33.825.000,- atau 80,85% dari alokasi anggaran.
- Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.300.000,- atau 96,47% dari alokasi anggaran.



j. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.518.179.250,- dan terealisasi sebesar Rp.474.058.250,- atau 91,49% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

k. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.045.375.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.874.030.000,- atau 97,57% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Makanan.

l. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.122.197.592,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

1.2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa, sebagai instansi yang menangani Urusan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 35 orang dengan 14 jabatan struktural yang diisi oleh 14 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.996.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.990.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.996.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.994.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.996.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.501.500,- dan terealisasi sebesar Rp.17.485.500,- atau 99,91% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.26.650.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.384.467,- dan terealisasi sebesar Rp.78.462.700,- atau 97,61% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.807.680,- dan terealisasi sebesar Rp.805.000,- atau 99,67% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.134.896,- dan terealisasi sebesar Rp.2.124.600,- atau 99,52% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.631.891,- dan terealisasi sebesar Rp.17.626.600,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.002.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.001.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp.52.705.000,- atau 96,52% dari alokasi anggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.52.594.659,- dan terealisasi sebesar Rp.49.395.028,- atau 93,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.594.659,- dan terealisasi sebesar Rp.43.395.028,- atau 93,13% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.61.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp.59.719.850,- atau 96,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.724.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.473.850,- atau 97,72% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.600.000,- atau 88,33% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.646.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.913.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.

h. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.76.085.000,- dan terealisasi sebesar Rp.73.385.000,- atau 96,45% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online.

i. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.975.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 15 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.698.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.692.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.001.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.000.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.697.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.692.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.665.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.000.000,- atau 60,06% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.81.963.650,- dan terealisasi sebesar Rp.81.291.650,- atau 99,18% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.496.650,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.632.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.960.000,- atau 89,87% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.335.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.119.913.996,- dan terealisasi sebesar Rp.112.956.042,- atau 94,20% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.123.996,- dan terealisasi sebesar Rp.22.866.042,- atau 84,30% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp.90.090.000,- atau 97,09% dari alokasi anggaran.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.66.153.950,- dan terealisasi sebesar Rp.61.713.300,- atau 93,29% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.903.950,- dan terealisasi sebesar Rp.58.613.300,- atau 93,18% dari alokasi anggaran.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.100.000,- atau 95,38% dari alokasi anggaran.
- g. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.820.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- h. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.454.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.158.328.579,- atau 34,87% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- i. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.970.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- j. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.060.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.



k. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.

l. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.429.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

m. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.170.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. URUSAN PANGAN

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Gowa, oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Ketahanan Pangan sebagai instansi teknis pelaksana Urusan Pangan, telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.297.500,- dan terealisasi sebesar Rp.9.291.500,- atau 99,94% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.335.250,- dan terealisasi sebesar Rp.6.332.250,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.188.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.147.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.144.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.70.586.000,- dan terealisasi sebesar Rp.70.547.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.347.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.90.301.373,- dan terealisasi sebesar Rp.90.294.877,- atau 99,99% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.506.267,- dan terealisasi sebesar Rp.49.571.100,- atau 98,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.437.267,- dan terealisasi sebesar Rp.29.502.100,- atau 96,93% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.069.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.999.700.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.



h. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.536.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.155.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.381.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.604.555.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.295.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.583.260.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

j. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

sebesar Rp.9.747.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

k. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.939.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.230.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.989.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.720.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



4. URUSAN PERTANAHAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Gowa sebagai institusi yang menangani urusan pertanahan telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Urusan pertanahan didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. **Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.106.093.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.015.049.841,- atau 98,51% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- b. **Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.806.163.000,- dan terealisasi sebesar Rp.330.083.700,- atau 40,95% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menangani urusan lingkungan hidup telah melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.097.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.065.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.032.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.194.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.80.155.500,- atau 99,82% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.354.468.477,- dan terealisasi sebesar Rp.354.368.206,- atau 99,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.989.619,- dan terealisasi sebesar Rp.9.989.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.586.358,- dan terealisasi sebesar Rp.33.582.600,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.308.492.500,- dan terealisasi sebesar Rp.308.396.606,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.123.652.833,- dan terealisasi sebesar Rp.122.469.000,- atau 99,04% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.971.925,- dan terealisasi sebesar Rp.10.945.000,- atau 99,75% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.680.908,- dan terealisasi sebesar Rp.111.524.000,- atau 98,97% dari alokasi anggaran.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.45.567.521,- dan terealisasi sebesar Rp.40.863.074,- atau 89,68% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.138.695.600,- dan terealisasi sebesar Rp.125.891.607,- atau 90,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.92.905.600,- dan terealisasi sebesar Rp.80.101.607,- atau 86,22% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.890.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.384.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

i. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.138.786.964,- dan terealisasi sebesar Rp.138.369.550,- atau 99,70% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup.

j. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.303.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.276.110.000,- atau 97,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.272.810.000,- atau 97,91% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.300.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



k. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

l. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.694.180.082,- dan terealisasi sebesar Rp.1.674.575.795,- atau 98,84% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.140.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.581.552.900,- dan terealisasi sebesar Rp.572.925.795,- atau 98,52% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.110.487.182,- dan terealisasi sebesar Rp.1.099.510.000,- atau 99,01% dari alokasi anggaran.

m. Penyimpanan Sementara Limbah B3

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.300.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.

n. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.023.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

o. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.930.000,- atau 98,58% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

p. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.237.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

q. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.120.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

r. Pengelolaan Sampah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.161.503.035,- dan terealisasi sebesar Rp.8.006.563.662,- atau 98,10% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.789.716.490,- dan terealisasi sebesar Rp.6.636.684.220,- atau 97,75% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.97.428.800,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.755.557.745,- dan terealisasi sebesar Rp.755.557.642,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.518.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.516.893.000,- atau 99,63% dari alokasi anggaran.

6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa sebagai institusi yang diserahi tugas administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, telah memprogramkan berbagai kegiatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 32 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.470.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.444.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.855.522.910,- dan terealisasi sebesar Rp.841.889.039,- atau 98,41% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.824.596.160,- dan terealisasi sebesar Rp.811.330.289,- atau 98,39% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.926.750,- dan terealisasi sebesar Rp.30.558.750,- atau 98,81% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.348.316.275,- dan terealisasi sebesar Rp.308.548.275,- atau 88,58% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.230.905.550,68 dan terealisasi sebesar Rp.230.150.227,- atau 99,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.099.196,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.013.297,68 dan terealisasi sebesar Rp.9.013.199,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.012.057,- dan terealisasi sebesar Rp.59.327.457,- atau 98,86% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.156.781.000,- dan terealisasi sebesar Rp.156.710.375,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.19.772.500,- dan terealisasi sebesar Rp.19.241.505,- atau 97,31% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.148.389.841,32 dan terealisasi sebesar Rp.138.098.302,- atau 93,06% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.412.534,32 dan terealisasi sebesar Rp.56.217.802,- atau 84,65% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.81.977.307,- dan terealisasi sebesar Rp.81.880.500,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.120.163.950,- dan terealisasi sebesar Rp.115.797.900,- atau 96,37% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.043.950,- dan terealisasi sebesar Rp.79.119.700,- atau 96,44% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.217.500,- atau 99,65% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.820.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.460.700,- atau 90,83% dari alokasi anggaran.

h. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.341.650.865,- dan terealisasi sebesar Rp.1.182.636.500,- atau 88,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.871.000,- dan terealisasi sebesar Rp.76.219.900,- atau 99,15% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.321.631,- dan terealisasi sebesar Rp.56.321.500,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.208.458.234,- dan terealisasi sebesar Rp.1.050.095.100,- atau 86,90% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

i. Pelayanan Pencatatan Sipil

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.37.805.288,- dan terealisasi sebesar Rp.34.646.000,- atau 91,64% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.

j. Penyusunan Profil Kependudukan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.935.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.462.000,- atau 97,84% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Untuk menjawab tuntutan masyarakat akan peran dan fungsi masyarakat sebagai *stakeholder* pemerintahan, sebagai subyek dan obyek pemerintahan dan pembangunan telah dilakukan berbagai program/kegiatan urusan wajib urusan pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai instansi teknis pelaksana. Dengan dukungan personil Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 Orang dengan 16 jabatan struktural yang diduduki oleh 16 orang pejabat. Sarana dan prasarana yang memadai juga mendukung terciptanya pencapaian urusan ini.

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.50.196.750,- dan terealisasi sebesar Rp.50.186.750,- atau 99,98% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.701.502.089,- dan terealisasi sebesar Rp.650.211.789,- atau 92,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.106.089,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.123.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.577.273.000,- dan terealisasi sebesar Rp.525.982.700,- atau 91,12% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.158.438.000,- dan terealisasi sebesar Rp.143.644.500,- atau 90,66% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.31.120.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.949.900,- atau 99,45% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.545.300,- dan terealisasi sebesar Rp.42.508.789,- atau 99,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.815.300,- dan terealisasi sebesar Rp.36.778.789,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.730.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Fasilitas Kerja Sama Antar Desa

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.132.630.000,- dan terealisasi sebesar Rp.131.680.000,- atau 99,28% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitas Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.720.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.770.000,- atau 93,08% dari alokasi anggaran.
- Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.910.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.455.571.896,- dan terealisasi sebesar Rp.2.205.155.120,- atau 89,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.50.590.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.303.872.896,- dan terealisasi sebesar Rp.2.054.906.120,- atau 89,19% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.109.000,- dan terealisasi sebesar Rp.99.659.000,- atau 98,57% dari alokasi anggaran.
- i. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.597.903.481,- dan terealisasi sebesar Rp.595.403.481,- atau 99,58% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.434.472.500,- dan terealisasi sebesar Rp.432.922.500,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.
 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.206.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.256.000,- atau 90,69% dari alokasi anggaran.
 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.224.981,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 20 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.648.500,- dan terealisasi sebesar Rp.6.498.500,- atau 84,96% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.360.00,- dan terealisasi sebesar Rp.600.000,- atau 17,86% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.926.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.69.098.941,- dan terealisasi sebesar Rp.69.008.721,- atau 99,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.917.692,- dan terealisasi sebesar Rp.1.917.500,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.515.753,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.412.496,- dan terealisasi sebesar Rp.14.412.468,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.163.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp.32.200.000,- atau 99,72% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.29.631.250,- dan terealisasi sebesar Rp.28.756.000,- atau 97,05% dari alokasi anggaran Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.199.318.918,- dan terealisasi sebesar Rp.190.057.551,- atau 95,35% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.398.718,- dan terealisasi sebesar Rp.47.353.351,- atau 83,96% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.920.200,- dan terealisasi sebesar Rp.142.704.200,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.180.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.123.272,- atau 98,15% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.46.344.772,- atau 97,77% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.798.500,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.980.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.856.838.518,- dan terealisasi sebesar Rp.346.015.518,- atau 40,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.810.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.299.277.000,- atau 36,95 % dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.413.578,- dan terealisasi sebesar Rp.25.313.578,- atau 99,61% dari alokasi anggaran.
- Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.188.392,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.236.548,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

i. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.735.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.729.576.400,- atau 99,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.576.000,- dan terealisasi sebesar Rp.107.553.400,- atau 99,06% dari alokasi anggaran.
 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.257.040.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.337.904.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.334.013.000,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.
 - Pengendalian Program KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.970.000,- atau 96,03% dari alokasi anggaran.
- j. *Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)***
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.966.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.962.750.000,- atau 99,8% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.801.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.150.000,- atau 89,18% dari alokasi anggaran.
 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.136.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.136.000.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.
- k. *Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.698.730.960,- dan terealisasi sebesar Rp.1.366.313.831,- atau 80,43 % dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.637.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.997.664.000,- dan terealisasi sebesar Rp.770.544.000,- atau 77,23% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.195.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.325.500,- atau 51,32% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.407.887.000,- dan terealisasi sebesar Rp.397.764.371,- atau 97,52% dari alokasi anggaran.
 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.050.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.992.960,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- l. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.257.184.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
- m. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.079.550.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.076.605.700,- atau 99,73% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.46.805.700,- atau 94,08% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.414.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.337.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.278.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

9. URUSAN PERHUBUNGAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Secara umum, kebijakan pembangunan di urusan perhubungan di Kabupaten Gowa diarahkan dalam rangka meningkatkan kelancaran lalu lintas sehingga diharapkan akan mendukung distribusi barang serta mobilitas penduduk untuk melakukan aktivitas sosial ekonominya. Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan pembangunan di urusan perhubungan telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 61 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.876.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.873.500,- atau 99,98% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.607.500,- dan terealisasi sebesar Rp.10.598.500,- atau 99,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.607.500,- dan terealisasi sebesar Rp.8.598.500,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.

- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.042.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.750.000,- atau 53,25% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.292.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.74.032.018,- dan terealisasi sebesar Rp.70.586.470,- atau 95,35% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.046.500,- dan terealisasi sebesar Rp.4.046.375,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.342.518,- dan terealisasi sebesar Rp.34.911.095,- atau 91,05% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.008.000,- dan terealisasi sebesar Rp.994.000,- atau 98,61% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.635.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.64.141.006,- dan terealisasi sebesar Rp.64.141.004,- atau 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Mebel.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.20.937.138.909,- dan terealisasi sebesar Rp.20.190.468.974,- atau 96,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.680.842.979,- dan terealisasi sebesar Rp.19.938.791.876,- atau 96,41% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.256.295.930,- dan terealisasi sebesar Rp.251.677.098,- atau 98,20% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.113.131.322,- dan terealisasi sebesar Rp.107.251.720,- atau 94,80% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

h. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.926.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.920.247.000,- atau 99,68% dari alokasi anggaran



melalui sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

i. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung).

j. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.173.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.165.190.000,- atau 95,38% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

k. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.237.375.526,- dan terealisasi sebesar Rp.233.025.297,- atau 98,17% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.199.750.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.375.526,- dan terealisasi sebesar Rp.33.275.297,- atau 89,03% dari alokasi anggaran.

l. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.289.842.950,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.

m. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.82.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

n. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.700.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.



o. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.970.497,- dan terealisasi sebesar Rp.6.970.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

p. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.871.250,- dan terealisasi sebesar Rp.4.870.669,- atau 99,99% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi komunikasi dan informasi terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa, telah merencanakan dan melaksanakan Program/Kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 37 orang dengan 12 jabatan struktural yang diisi oleh 12 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.62.898.750,- dan terealisasi sebesar Rp.62.999.750,- atau 100,16% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.037.250,- dan terealisasi sebesar Rp.22.996.250,- atau 99,82% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.374.750,- dan terealisasi sebesar Rp.20.308.750,- atau 99,68% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.486.750,- dan terealisasi sebesar Rp.19.694.750,- atau 101,07% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.84.061.000,- dan terealisasi sebesar Rp.82.722.000,- atau 98,41% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.968.000,- dan terealisasi sebesar Rp.70.664.000,- atau 98,19% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.329.000,- atau 99,83% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.753.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.729.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.28.250.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.412.325.517,- dan terealisasi sebesar Rp.403.776.195,- atau 97,93% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.293.980,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.724.372,- dan terealisasi sebesar Rp.1.724.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.378.165,- dan terealisasi sebesar Rp.31.378.164,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.377.929.000,- dan terealisasi sebesar Rp.369.380.051,- atau 97,74% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.581.744.143,- dan terealisasi sebesar Rp.560.922.040,- atau 96,42% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.363.256.525,- dan terealisasi sebesar Rp.357.501.040,- atau 98,42% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.487.618,- dan terealisasi sebesar Rp.203.421.000,- atau 93,10% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.211.081.700,- dan terealisasi sebesar Rp.208.531.788,- atau 98,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.99.071.700,- dan terealisasi sebesar Rp.96.645.788,- atau 97,55% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.110.000,- dan terealisasi sebesar Rp.71.986.000,- atau 99,83% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.803.375.500,- dan terealisasi sebesar Rp.2.778.484.949,- atau 99,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.569.563.400,- dan terealisasi sebesar Rp.2.545.376.178,- atau 99,06% dari alokasi anggaran.
- Pelayanan Informasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.228.564.600,- dan terealisasi sebesar Rp.227.861.271,- atau 99,69% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.247.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.635.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.634.999.878,- atau 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

i. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.706.504.564,- dan terealisasi sebesar Rp.701.337.200,- atau 99,27% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.477.364,- dan terealisasi sebesar Rp.204.897.000,- atau 99,72% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.877.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.375.846.200,- dan terealisasi sebesar Rp.372.051.200,- atau 98,99% dari alokasi anggaran.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.83.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp.82.512.000,- atau 99,05% dari alokasi anggaran.

11. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan koperasi, usaha kecil dan menengah telah melakukan berbagai program/kegiatan. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 16 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.934.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.977.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.956.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

- b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.158.456.689,- dan terealisasi sebesar Rp.154.147.090,- atau 97,28% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.153.016.189,- dan terealisasi sebesar Rp.148.865.173,- atau 97,29% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.440.500,- dan terealisasi sebesar Rp.5.281.917,- atau 97,09% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.600.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.168.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.452.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.916.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.476.730,- dan terealisasi sebesar Rp.10.470.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.30.175.535,- dan terealisasi sebesar Rp.24.914.985,- atau 82,57% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.675.535,- dan terealisasi sebesar Rp.14.414.985,- atau 73,26% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.492.942,- dan terealisasi sebesar Rp.58.462.774,- atau 99,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Rp.54.160.942,- dan terealisasi sebesar Rp.54.130.774,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.382.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.932.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

i. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

j. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.250.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

k. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.82.150.000,- dan terealisasi sebesar Rp.82.050.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.050.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.000.000,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.



l. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.38.736.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

12. URUSAN PENANAMAN MODAL

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa sebagai institusi baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 diserahi tugas menangani urusan penanaman modal, telah melakukan berbagai program dan kegiatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.554.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.522.000,- atau 99,51% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.098.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.082.000,- atau 99,48% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.456.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.440.000,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp.16.775.000,- atau 99,38% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.135.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.22.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.127.358.771,- dan terealisasi sebesar Rp.126.222.576,- atau 99,11% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.947.771,- dan terealisasi sebesar Rp.14.947.300,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.004.297,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.406.000,- dan terealisasi sebesar Rp.95.270.979,- atau 98,82% dari alokasi anggaran.
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.132.245.329,- dan terealisasi sebesar Rp.123.603.721,- atau 93,47% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.721.083,- dan terealisasi sebesar Rp.78.079.721,- atau 90,04% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.524.246,- dan terealisasi sebesar Rp.45.524.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.59.293.900,- dan terealisasi sebesar Rp.58.927.410,- atau 99,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.343.900,- dan terealisasi sebesar Rp.56.977.410,- atau 99,36% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.141.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.



i. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.70.206.750,- dan terealisasi sebesar Rp.70.197.750,- atau 99,99% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

j. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.322.573.000,- dan terealisasi sebesar Rp.269.340.108,- atau 83,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.233.579,- dan terealisasi sebesar Rp.92.018.008,- atau 79,85% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.606.206,- dan terealisasi sebesar Rp.119.034.000,- atau 99,52% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.87.733.215,- dan terealisasi sebesar Rp.58.288.100,- atau 66,44% dari alokasi anggaran.

13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani Urusan Kepemudaan dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang dengan 13 jabatan struktural yang diisi oleh 13 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.151.808.491,- dan terealisasi sebesar Rp.1.126.373.996,- atau 97,79% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.068.928.491,- dan terealisasi sebesar Rp.1.057.436.886,- atau 98,92% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp.68.937.110,- atau 83,18% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.378.122.370,- dan terealisasi sebesar Rp.372.007.492,- atau 98,38% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.751.225,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.851.225,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.900.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

d. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.304.557.448,- dan terealisasi sebesar Rp.282.016.661,- atau 92,60% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.61.505.791,- dan terealisasi sebesar Rp.61.505.756,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.243.051.657,- dan terealisasi sebesar Rp.220.510.905,- atau 90,73% dari alokasi anggaran.

e. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.535.091,- dan terealisasi sebesar Rp.73.231.000,- atau 99,59% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.

f. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.72.793.655,- dan terealisasi sebesar Rp.72.788.155,- atau 99,99% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota.



g. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.462.330.981,- dan terealisasi sebesar Rp.462.330.900,- atau 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan.

h. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.61.505.775,- dan terealisasi sebesar Rp.61.430.988,- atau 99,88% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.

14. URUSAN STATISTIK

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Statistik telah merencanakan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 37 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.592.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.572.000,- atau 99,84% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.

15. URUSAN PERSANDIAN

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Persandian telah merencanakan dan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 37 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.218.059.353,- dan terealisasi sebesar Rp.209.887.103,- atau 96,25% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.864.000,- atau 99,60% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



16. URUSAN KEBUDAYAAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas Urusan Budaya telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.800.125.290,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.201.720.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.318.230.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.280.175.290,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah institusi yang disertai tugas Urusan Perpustakaan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan guna mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Gowa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang dengan 8 jabatan struktural yang diisi oleh 8 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.264.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.256.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.319.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.



c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.950.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.74.427.341,- dan terealisasi sebesar Rp.74.427.087,- atau 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.508.001,- dan terealisasi sebesar Rp.11.507.747,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.018.340,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.57.901.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.118.523.411,- dan terealisasi sebesar Rp.107.196.351,- atau 90,44% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.232.411,- dan terealisasi sebesar Rp.16.530.351,- atau 68,22% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.291.000,- dan terealisasi sebesar Rp.90.666.000,- atau 96,16% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.113.032.900,- dan terealisasi sebesar Rp.110.364.216,- atau 97,64% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.626.900,- dan terealisasi sebesar Rp.39.746.750,- atau 97,83% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.061.000,- dan terealisasi sebesar Rp.63.272.466,- atau 97,25% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.330.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.015.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

h. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.991.925.171,- atau 99,92% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

18. URUSAN KEARSIPAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai institusi yang diserahi tugas Urusan Kearsipan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 17 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.597.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

b. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.245.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.165.000,- atau 99,56% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.2. RINGKASAN URUSAN PILIHAN

1. URUSAN PERIKANAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gowa sebagai instansi teknis yang menangani Urusan Perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sebagai dinas baru yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016. Dinas Perikanan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang dengan 15 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.370.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.124.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.246.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.352.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.252.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.104.286.810,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.176.810,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.380.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.730.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.134.239.402,- dan terealisasi sebesar Rp.128.865.176,- atau 96,00% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.007.152,- dan terealisasi sebesar Rp.46.632.926,- atau 89,67% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.232.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55.084.750,- dan terealisasi sebesar Rp.51.716.490,- atau 93,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.886.000,- dan terealisasi sebesar Rp.46.517.740,- atau 93,25% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.198.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.396.885.000,- dan terealisasi sebesar Rp.388.875.765,- atau 97,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.385.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.376.990.765,- atau 97,92% dari alokasi anggaran.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.885.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.215.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

i. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.990.000,- dan terealisasi sebesar Rp.80.950.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

j. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.670.367.500,- dan terealisasi sebesar Rp.664.201.450,- atau 99,08% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.314.954.000,- dan terealisasi sebesar Rp.314.564.700,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.355.413.500,- dan terealisasi sebesar Rp.349.636.750,- atau 98,37% dari alokasi anggaran.

k. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.354.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

l. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.18.361.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

m. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.198.003.000,- dan terealisasi sebesar Rp.197.735.000,- atau 99,86% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. URUSAN PERTANIAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Gowa, oleh Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Peternakan dan Perkebunan sebagai instansi teknis pelaksana urusan pilihan bidang pertanian, telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 114 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Sedangkan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.942.500,- dan terealisasi sebesar Rp.14.925.000,- atau 88,09% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.306.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.131.000,- atau 78,90% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.828.171.491,- dan terealisasi sebesar Rp.804.342.339,- atau 97,12% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.394.874,- dan terealisasi sebesar Rp.1.394.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.907.617,- dan terealisasi sebesar Rp.58.527.083,- atau 99,35% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.520.000,- atau 92,00% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.761.869.000,- dan terealisasi sebesar Rp.738.901.256,- atau 96,99% dari alokasi anggaran.

b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.372.490.270,48 dan terealisasi sebesar Rp.337.107.754,- atau 90,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.460.270,48 dan terealisasi sebesar Rp.76.689.754,- atau 70,06% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.263.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.260.418.000,- atau 99,01% dari alokasi anggaran.

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.88.977.018,- dan terealisasi sebesar Rp.75.204.324,- atau 84,52% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.795.358,- dan terealisasi sebesar Rp.61.124.289,- atau 86,34% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.290.035,- atau 36,64% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.815.000,- atau 99,40% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.081.660,- dan terealisasi sebesar Rp.5.975.000,- atau 98,25% dari alokasi anggaran.

d. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.765.105.000,- dan terealisasi sebesar Rp.733.592.500,- atau 95,88% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.712.480.000,- dan terealisasi sebesar Rp.681.230.000,- atau 95,61% dari alokasi anggaran.
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp.52.362.500,- atau 99,50% dari alokasi anggaran.

e. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.171.125.800,- dan terealisasi sebesar Rp.76.625.800,- atau 44,78% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman.

f. Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.140.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B.

g. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.874.852.915,- dan terealisasi sebesar Rp.6.836.958.915,- atau 99,45% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.615.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.900.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.480.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.869.852.915,- dan terealisasi sebesar Rp.831.958.915,- atau 95,64% dari alokasi anggaran.

h. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.113.230.500,- dan terealisasi sebesar Rp.113.068.000,- atau 99,86% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.

i. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.184.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

3. URUSAN PARIWISATA

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa sebagai instansi yang menangani bidang kepariwisataan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 34 orang dengan 15 jabatan struktural yang diisi oleh 15 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.254.805.000,- dan terealisasi sebesar Rp.254.609.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.280.651.180,- dan terealisasi sebesar Rp.244.526.394,- atau 87,13% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.353.879,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.243.096,- dan terealisasi sebesar Rp.1.243.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.300.155,- dan terealisasi sebesar Rp.9.296.165,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.040.050,- dan terealisasi sebesar Rp.12.039.750,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.087.000,- dan terealisasi sebesar Rp.58.001.000,- atau 80,46% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.427.000,- dan terealisasi sebesar Rp.139.392.600,- atau 86,35% dari alokasi anggaran.

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.163.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.65.383.620,- dan terealisasi sebesar Rp.59.648.399,- atau 91,23% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.390.675,- dan terealisasi sebesar Rp.55.280.469,- atau 91,54% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.992.945,- dan terealisasi sebesar Rp.4.367.930,- atau 87,48% dari alokasi anggaran.
- e. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.63.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.568.600,- atau 99,32% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
- f. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.862.578.000,- dan terealisasi sebesar Rp.670.858.000,- atau 77,77% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

4. URUSAN PERDAGANGAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai institusi yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan perdagangan, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang dengan 19 jabatan struktural yang diisi oleh 19 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.068.500,- dan terealisasi sebesar Rp.54.979.500,- atau 96,34% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.929.500,- dan terealisasi sebesar Rp.15.942.500,- atau 88,92% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.139.000,- dan terealisasi sebesar Rp.39.037.000,- atau 99,74% dari alokasi anggaran.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.36.244.500,- dan terealisasi sebesar Rp.31.158.500,- atau 85,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.339.500,- dan terealisasi sebesar Rp.5.015.500,- atau 68,34% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.905.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.143.000,- atau 90,44% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.549.000,- atau 98,95% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.801.415.112,- dan terealisasi sebesar Rp.801.135.513,- atau 99,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.037.180,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.053.932,- dan terealisasi sebesar Rp.58.915.000,- atau 99,76% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.560.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.693.764.000,- dan terealisasi sebesar Rp.693.623.333,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.188.764.243,- dan terealisasi sebesar Rp.187.168.000,- atau 99,15% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.476.296.228,- dan terealisasi sebesar Rp.435.448.459,- atau 91,42% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.757.478,- dan terealisasi sebesar Rp.61.931.709,- atau 60,27% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.373.538.750,- dan terealisasi sebesar Rp.373.516.750,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.170.333.900,- dan terealisasi sebesar Rp.169.372.295,- atau 99,44% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.64.622.650,- dan terealisasi sebesar Rp.64.122.650,- atau 99,23% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.421.250,- dan terealisasi sebesar Rp.31.959.645,- atau 98,58% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.330.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.960.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

h. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.321.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik.

i. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.749.686.306,- dan terealisasi sebesar Rp.2.487.466.700,- atau 28,43% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.

j. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.672.003.140,- dan terealisasi sebesar Rp.668.437.790,- atau 99,47% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.290.740,- dan terealisasi sebesar Rp.103.289.390,- atau 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.568.712.400,- dan terealisasi sebesar Rp.565.148.400,- atau 99,37% dari alokasi anggaran.

k. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.094.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.

l. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.705.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.

m. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.092.250,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.

n. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.174.024.500,- dan terealisasi sebesar Rp.172.774.500,- atau 99,28% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.310.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pameran Dagang Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.057.500,- dan terealisasi sebesar Rp.77.807.500,- atau 98,42% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.89.657.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

o. Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.42.175.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang.



5. URUSAN PERINDUSTRIAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa sebagai instansi teknis yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan bidang perindustrian, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang dengan 4 jabatan struktural yang diisi oleh 4 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. **Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.41.566.250,- dan terealisasi sebesar Rp.34.443.750,- atau 82,86% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.963.500,- dan terealisasi sebesar Rp.7.563.500,- atau 94,98% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.602.750,- dan terealisasi sebesar Rp.26.880.250,- atau 79,99% dari alokasi anggaran.

6. URUSAN TRANSMIGRASI

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi perencanaan urusan Pilihan Bidang Transmigrasi di Kabupaten Gowa, telah merencanakan dan melaksanakan program/kegiatan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 41 orang dengan 3 jabatan struktural yang diisi oleh 3 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.14.379.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman.



3.1.3 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan adalah Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 139 orang dengan 48 jabatan struktural yang diisi oleh 48 pejabat struktural.

- **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.66.878.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.822.000,- atau 99,92% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.19.966.000,- dan terealisasi sebesar Rp.19.944.000,- atau 99,89% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.467.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.465.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.945.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.913.000,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.144.711.000,- dan terealisasi sebesar Rp.134.592.000,- atau 93,01% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.000.000,- atau 71,43% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.574.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.616.000,- dan terealisasi sebesar Rp.21.583.000,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.446.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.380.000,- atau 99,71% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.075.000,- dan terealisasi sebesar Rp.44.055.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.751.108.150,- dan terealisasi sebesar Rp.697.473.426,- atau 92,86% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.646.421.426,- atau 92,35% dari alokasi anggaran.
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.376.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.354.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.28.732.150,- dan terealisasi sebesar Rp.28.698.000,- atau 99,88% dari alokasi anggaran.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.275.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.180.982.500,- atau 65,80% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.667.770.920,- dan terealisasi sebesar Rp.13.215.177.802,- atau 96,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.577.641,- dan terealisasi sebesar Rp.249.024.000,- atau 98,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.913.119,- dan terealisasi sebesar Rp.249.132.500,- atau 99,69% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.284.241.560,- dan terealisasi sebesar Rp.198.315.100,- atau 69,77% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.399.928.600,- dan terealisasi sebesar Rp.324.024.000,- atau 81,02% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.222.184.000,- dan terealisasi sebesar Rp.11.934.756.202,- atau 97,65% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.259.926.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.766.576.865,- dan terealisasi sebesar Rp.5.219.859.340,- atau 67,21% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.359.504.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.914.100.000,- atau 54,37% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.427.670.322,- dan terealisasi sebesar Rp.403.470.000,- atau 94,34% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.979.402.543,- dan terealisasi sebesar Rp.1.902.289.340,- atau 96,10% dari alokasi anggaran.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.526.039.293,12 dan terealisasi sebesar Rp.7.177.742.325,- atau 95,37% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.450.633.693,12 dan terealisasi sebesar Rp.2.220.555.925,- atau 90,61% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.818.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.771.060.000,- atau 97,40% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.257.005.600,- dan terealisasi sebesar Rp.3.186.126.400,- atau 97,82% dari alokasi anggaran.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.189.219.966,- dan terealisasi sebesar Rp.3.996.161.308,- atau 95,39% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.086.593.923,- dan terealisasi sebesar Rp.1.983.490.258,- atau 95,06% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Mebel, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.232.191.325,- dan terealisasi sebesar Rp.230.301.000,- atau 99,19% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.858.434.718,- dan terealisasi sebesar Rp.1.770.370.050,- atau 95,26% dari alokasi anggaran.

i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.526.920,- dan terealisasi sebesar Rp.8.638.400,- atau 40,13% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

j. Penataan Organisasi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.409.285.000,- dan terealisasi sebesar Rp.365.905.000,- atau 89,40% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.273.000,- dan terealisasi sebesar Rp.179.973.000,- atau 95,09% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.773.000,- dan terealisasi sebesar Rp.52.230.000,- atau 92,00% dari alokasi anggaran.
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.35.131.000,- dan terealisasi sebesar Rp.24.960.000,- atau 71,05% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.42.068.000,- dan terealisasi sebesar Rp.40.104.000,- atau 95,33% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.040.000,- dan terealisasi sebesar Rp.68.638.000,- atau 79,77% dari alokasi anggaran.

k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.041.032.750,- dan terealisasi sebesar Rp.2.843.405.844,- atau 93,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitasi Keprotokolan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.691.842.750,- dan terealisasi sebesar Rp.2.510.560.844,- atau 93,27% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.130.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.113.845.000,- atau 87,45% dari alokasi anggaran.
- Pendokumentasian Tugas Pimpinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.219.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

l. Administrasi Tata Pemerintahan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.126.999.500,- dan terealisasi sebesar Rp.999.352.000,- atau 88,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penataan Administrasi Pemerintahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.744.355.500,- dan terealisasi sebesar Rp.719.268.000,- atau 96,63% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.247.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.320.396.500,- dan terealisasi sebesar Rp.217.836.500,- atau 67,99% dari alokasi anggaran.

m. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.754.441.718,- dan terealisasi sebesar Rp.480.717.425,- atau 63,72% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.692.102.000,- dan terealisasi sebesar Rp.418.582.000,- atau 60,48% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.511.906,- dan terealisasi sebesar Rp.32.307.613,- atau 99,37% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.759.908,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.067.904,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

n. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.267.608.852,- dan terealisasi sebesar Rp.944.445.822,- atau 74,51% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.539.602.602,- dan terealisasi sebesar Rp.524.336.072,- atau 97,17% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.816.250,- dan terealisasi sebesar Rp.399.240.250,- atau 56,97% dari alokasi anggaran.
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.190.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.869.500,- atau 76,75% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

o. Fasilitas Kerjasama Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.104.924.000,- dan terealisasi sebesar Rp.102.829.000,- atau 98,00% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.800.000,- atau 77,55% dari alokasi anggaran.
- Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.524.000,- dan terealisasi sebesar Rp.90.529.000,- atau 98,91% dari alokasi anggaran.

p. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.171.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp.118.657.500,- atau 69,21% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp.93.257.500,- atau 63,85% dari alokasi anggaran.

q. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.79.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp.77.662.000,- atau 97,50% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

r. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.609.379.826,83 dan terealisasi sebesar Rp.601.370.147,- atau 98,69% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.235.747.412,83 dan terealisasi sebesar Rp.234.977.412,- atau 99,67% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.148.779,- dan terealisasi sebesar Rp.112.110.000,- atau 99,97% dari alokasi anggaran.
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.261.483.635,- dan terealisasi sebesar Rp.254.282.735,- atau 97,25% dari alokasi anggaran.



s. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.21.700.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

2. PENGAWASAN

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan internal terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 36 orang dengan 9 jabatan struktural yang diisi oleh 9 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.52.626.000,- dan terealisasi sebesar Rp.52.596.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.172.000,- dan terealisasi sebesar Rp.45.164.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.454.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.432.000,- atau 99,70% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.223.748.000,- dan terealisasi sebesar Rp.215.446.000,- atau 96,29% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.216.294.000,- dan terealisasi sebesar Rp.208.006.000,- atau 96,17% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.454.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.440.000,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.328.929.000,- dan terealisasi sebesar Rp.230.050.000,- atau 69,94% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.63.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.62.910.000,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.265.929.000,- dan terealisasi sebesar Rp.167.140.000,- atau 62,85% dari alokasi anggaran.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.545.247.234,- dan terealisasi sebesar Rp.544.777.737,- atau 99,91% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.683.025,- dan terealisasi sebesar Rp.4.682.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.110.955,- dan terealisasi sebesar Rp.3.080.000,- atau 99,00% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.085.754,- dan terealisasi sebesar Rp.42.984.612,- atau 99,77% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.16.812.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.500.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.908.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.386.147.000,- dan terealisasi sebesar Rp.385.810.625,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.106.095.615,- dan terealisasi sebesar Rp.106.095.312,- atau 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.73.799.430,07 dan terealisasi sebesar Rp.41.013.732,- atau 55,57% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.



g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.916.455.925,- dan terealisasi sebesar Rp.895.334.508,- atau 97,70% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.008.350,- dan terealisasi sebesar Rp.42.370.708,- atau 94,14% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.847.657.575,- dan terealisasi sebesar Rp.829.183.800,- atau 97,82% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.790.000,- dan terealisasi sebesar Rp.23.780.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.

h. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.345.495.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.309.376.000,- atau 97,32% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.207.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp.207.660.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.245.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp.209.860.000,- atau 85,54% dari alokasi anggaran.
- Reviu Laporan Kinerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp.85.944.500,- atau 99,92% dari alokasi anggaran.
- Reviu Laporan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.291.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp.290.938.500,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Pengawasan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.501.445.000,- dan terealisasi sebesar Rp.501.258.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.935.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.715.000,- atau 98,42% dari alokasi anggaran.

i. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.589.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp.589.195.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.



j. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.211.515.000,- dan terealisasi sebesar Rp.211.437.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.080.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.113.425.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.010.000,- dan terealisasi sebesar Rp.85.932.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran.

3. PERENCANAAN

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 30 orang dengan 16 jabatan struktural yang diisi oleh 16 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.60.449.750,- dan terealisasi sebesar Rp.59.940.348,- atau 99,16% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.27.311.000,- dan terealisasi sebesar Rp.27.302.200,- atau 99,97% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.24.700.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.844.989.331,- dan terealisasi sebesar Rp.813.724.748,- atau 96,30% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.443.495,- dan terealisasi sebesar Rp.4.441.000,- atau 99,94% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.368.379,- dan terealisasi sebesar Rp.12.362.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.190.422.457,- dan terealisasi sebesar Rp.188.572.486,- atau 99,03% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.637.755.000,- dan terealisasi sebesar Rp.608.349.262,- atau 95,39% dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.574.183.750,- dan terealisasi sebesar Rp.569.677.977,- atau 99,22% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.74.997.772,- dan terealisasi sebesar Rp.70.081.578,- atau 93,44% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.87.419.800,- dan terealisasi sebesar Rp.86.049.073,- atau 98,43% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.679.800,- dan terealisasi sebesar Rp.77.339.073,- atau 98,30% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.740.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.710.000,- atau 99,66% dari alokasi anggaran.

h. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.582.472.014,- dan terealisasi sebesar Rp.557.169.856,- atau 95,66% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.136.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp.132.803.000,- atau 97,09% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.439.000,- dan terealisasi sebesar Rp.38.782.000,- atau 83,51% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Konsultasi Publik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.23.407.500,- dan terealisasi sebesar Rp.23.307.500,- atau 99,57% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.877.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.247.000,- atau 95,11% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.119.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp.117.759.725,- atau 98,85% dari alokasi anggaran.
- Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.798.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.231.035.514,- dan terealisasi sebesar Rp.219.472.631,- atau 95,00% dari alokasi anggaran.

i. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.738.000,- dan terealisasi sebesar Rp.12.735.500,- atau 71,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.220.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.217.500,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.
- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.518.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.518.000,- atau 33,49% dari alokasi anggaran.

j. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.36.207.500,- dan terealisasi sebesar Rp.36.136.500,- atau 99,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.698.500,- dan terealisasi sebesar Rp.17.635.500,- atau 99,64% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.509.000,- dan terealisasi sebesar Rp.18.501.000,- atau 99,96% dari alokasi anggaran.

k. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.26.157.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.984.800,- atau 99,34% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.203.500,- dan terealisasi sebesar Rp.11.162.400,- atau 99,63% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.953.500,- dan terealisasi sebesar Rp.14.822.400,- atau 99,12% dari alokasi anggaran.

l. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.25.696.250,- dan terealisasi sebesar Rp.18.755.200,- atau 72,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.035.250,- dan terealisasi sebesar Rp.9.994.200,- atau 99,59% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.561.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.200.000,- atau 14,81% dari alokasi anggaran.

4. KEUANGAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi urusan keuangan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 55 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 46 orang dengan 21 jabatan struktural yang diisi oleh 21 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.211.961.250,- dan terealisasi sebesar Rp.202.027.250,- atau 95,31% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.707.000,- dan terealisasi sebesar Rp.136.874.000,- atau 93,30% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.65.254.250,- dan terealisasi sebesar Rp.65.153.250,- atau 99,85% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.898.422.265,- dan terealisasi sebesar Rp.1.372.521.250,- atau 72,30% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.175.405.015,- dan terealisasi sebesar Rp.738.592.000,- atau 62,84% dari alokasi anggaran.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.607.077.250,- dan terealisasi sebesar Rp.519.863.000,- atau 85,63% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.114.066.250,- atau 98,38% dari alokasi anggaran.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.138.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.129.200.000,- atau 93,08% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.158.016.689,- dan terealisasi sebesar Rp.1.100.548.159,- atau 95,04% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.345.683,- dan terealisasi sebesar Rp.9.320.000,- atau 99,73% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.124.693,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.247.365.313,- dan terealisasi sebesar Rp.245.810.666,- atau 99,37% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.660.000,- atau 83,28% dari alokasi anggaran.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.82.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.82.320.000,- atau 99,78% dari alokasi anggaran.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.799.881.000,- dan terealisasi sebesar Rp.746.312.800,- atau 93,30% dari alokasi anggaran.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.798.449.634,- dan terealisasi sebesar Rp.779.813.600,- atau 97,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.503.449.634,- dan terealisasi sebesar Rp.496.863.600,- atau 98,69% dari alokasi anggaran.
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.295.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.282.950.000,- atau 95,92% dari alokasi anggaran.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.303.855.796,- dan terealisasi sebesar Rp.249.750.496,- atau 82,19% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.135.027.193,- dan terealisasi sebesar Rp.82.195.496,- atau 60,87% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.65.380.000,- atau 98,11% dari alokasi anggaran.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.102.188.603,- dan terealisasi sebesar Rp.102.175.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.393.085.643,- dan terealisasi sebesar Rp.312.960.609,- atau 79,62% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.118.325.500,- dan terealisasi sebesar Rp.105.338.626,- atau 89,02% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.096.950,- dan terealisasi sebesar Rp.82.801.333,- atau 56,68% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.58.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp.57.049.500,- atau 97,19% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.963.193,- dan terealisasi sebesar Rp.67.771.150,- atau 96,87% dari alokasi anggaran.

h. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.589.283.669,- dan terealisasi sebesar Rp.455.999.500,- atau 77,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.453.320,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.453.320,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.48.734.680,- dan terealisasi sebesar Rp.47.536.000,- atau 97,54% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.223.209,- dan terealisasi sebesar Rp.32.791.000,- atau 66,62% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.256.488.570,- dan terealisasi sebesar Rp.197.501.500,- atau 77,00% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.184.580.570,- dan terealisasi sebesar Rp.170.671.000,- atau 92,46% dari alokasi anggaran.
 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp.7.500.000,- atau 48,86% dari alokasi anggaran.
- i. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.434.939.266,- dan terealisasi sebesar Rp.395.738.500,- atau 90,99% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.242.000,- dan terealisasi sebesar Rp.41.236.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran.
 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.258.000,- dan terealisasi sebesar Rp.112.115.000,- atau 89,51% dari alokasi anggaran.
 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.60.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp.48.770.000,- atau 81,24% dari alokasi anggaran.
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.114.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.114.597.000,- atau 100% dari alokasi anggaran.
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.93.809.266,- dan terealisasi sebesar Rp.79.020.500,- atau 84,24% dari alokasi anggaran.
- j. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.332.292.872,- dan terealisasi sebesar Rp.292.838.750,- atau 88,13% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :
- Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.378.000,- dan terealisasi sebesar Rp.80.770.000,- atau 78,13% dari alokasi anggaran.
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.151.765.000,- dan terealisasi sebesar Rp.151.551.750,- atau 99,86% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.150.000,- dengan realisasi fisik dan keuangan 0 % dari alokasi anggaran.
- Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.62.999.872,- dan terealisasi sebesar Rp.60.517.000,- atau 96,06% dari alokasi anggaran.

k. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.520.173.250,- dan terealisasi sebesar Rp.445.634.750,- atau 85,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.226.588.000,- dan terealisasi sebesar Rp.223.068.000,- atau 98,45% dari alokasi anggaran.
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76.080.750,- dan terealisasi sebesar Rp.61.232.000,- atau 80,48% dari alokasi anggaran.
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.34.769.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.476.500,- atau 99,16% dari alokasi anggaran.
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.735.500,- dan terealisasi sebesar Rp.126.858.250,- atau 69,42% dari alokasi anggaran.

l. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.153.857.265,- dan terealisasi sebesar Rp.1.135.113.100,- atau 98,38% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.750.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.285.253.265,- dan terealisasi sebesar Rp.285.253.100,- atau 100% dari alokasi anggaran.
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp.117.112.000,- atau 99,81% dari alokasi anggaran.
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.840.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.824.000,- atau 99,98% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.674.674.000,- dan terealisasi sebesar Rp.656.174.000,- atau 97,26% dari alokasi anggaran.

5. KEPEGAWAIAN

• **Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa yang dahulu bernama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang disertai tugas melakukan koordinasi kepegawaian untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• **Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021**

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.55.522.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.165.000,- atau 95,75% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.559.219.000,- dan terealisasi sebesar Rp.520.806.600,- atau 93,13% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.104.181.380,- dan terealisasi sebesar Rp.104.090.500,- atau 99,91% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.265.111.160,- dan terealisasi sebesar Rp.258.911.400,- atau 97,66% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.63.082.400,- dan terealisasi sebesar Rp.62.282.300,- atau 98,73% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.232.400,- dan terealisasi sebesar Rp.39.432.400,- atau 98,01% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.22.849.900,- atau 100% dari alokasi anggaran.

f. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.685.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp.604.323.500,- atau 88,18% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.

g. Mutasi dan Promosi ASN

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.452.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp.340.560.000,- atau 75,20% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.109.270.000,- dan terealisasi sebesar Rp.100.374.000,- atau 91,86% dari alokasi anggaran.
- Pengelolaan Promosi ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.343.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.240.186.000,- atau 69,91% dari alokasi anggaran.

h. Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.46.368.500,- dan terealisasi sebesar Rp.46.360.500,- atau 99,98% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN.

i. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.613.500,- dan terealisasi sebesar Rp.9.173.500,- atau 86,43% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa yang dahulu bernama Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa sebagai instansi yang diserahi tugas melakukan koordinasi pendidikan dan pelatihan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang dengan 17 jabatan struktural yang diisi oleh 17 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Pengembangan Kompetensi Teknis

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.96.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp.96.354.000,- atau 99,99% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.188.231.884,- dan terealisasi sebesar Rp.1.103.370.100,- atau 92,86% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

7. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa yang disertai tugas melakukan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan untuk tingkat kabupaten, telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang dengan 13 jabatan struktural yang diisi oleh 13 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.23.742.500,- dan terealisasi sebesar Rp.23.715.500,- atau 99,89% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.782.500,- dan terealisasi sebesar Rp.17.759.500,- atau 99,87% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.956.000,- atau 99,93% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.932.000,- atau 99,91% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.109.990.694,40 dan terealisasi sebesar Rp.109.798.692,- atau 99,83% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.379.692,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.988.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.95.223.002,40 dan terealisasi sebesar Rp.95.031.000,- atau 99,80% dari alokasi anggaran.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.373.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.40.800.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.48.660.500,- dan terealisasi sebesar Rp.47.376.125,- atau 97,36% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.250.500,- dan terealisasi sebesar Rp.39.106.125,- atau 97,16% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.410.000,- dan terealisasi sebesar Rp.8.270.000,- atau 98,34% dari alokasi anggaran.

g. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.67.551.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

h. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.060.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.



i. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.787.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.154.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.633.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

8. UNSUR KEWILAYAHAN

• ***Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana***

Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi unsur kewilayahan termasuk di dalamnya kelurahan sebagai entitas dari kecamatan telah merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan. Kecamatan di Kabupaten Gowa sebanyak 18 kecamatan dengan 9 kecamatan dataran rendah (Somba Opu, Pallangga, Bontomarannu, Barombong, Bajeng, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Pattallassang dan Bajeng Barat) sedangkan 9 kecamatan dataran tinggi (Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Tompobulu, Biringbulu, Bontolempangan, Bungaya dan Parigi). Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• ***Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021***

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.33.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.33.150.000,- atau 98,08% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.494.334.484,- dan terealisasi sebesar Rp.487.110.437,- atau 98,54% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.865.299,- dan terealisasi sebesar Rp.4.865.175,- atau 100% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.586.756,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.649.624,- dan terealisasi sebesar Rp.51.607.008,- atau 98,02% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.417.100,- dan terealisasi sebesar Rp.18.515.600,- atau 90,69% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.500.000,- atau 97,22% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.222.705,- dan terealisasi sebesar Rp.4.205.705,- atau 99,60% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.970.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.298.000,- atau 95,51% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.392.023.000,- dan terealisasi sebesar Rp.388.532.193,- atau 99,11% dari alokasi anggaran.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.133.066.912,- dan terealisasi sebesar Rp.132.320.517,- atau 99,44% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.103.066.912,- dan terealisasi sebesar Rp.102.320.517,- atau 99,28% dari alokasi anggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.753.561.835,72 dan terealisasi sebesar Rp.2.684.702.030,00 atau 97,50% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.342.737.699,72 dan terealisasi sebesar Rp.290.019.814,- atau 84,62% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.381.007,- dan terealisasi sebesar Rp.6.155.000,- atau 96,46% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.404.443.129,- dan terealisasi sebesar Rp.2.388.527.216,- atau 99,34% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.596.243.145,- dan terealisasi sebesar Rp.577.559.189,- atau 96,87% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.465.831.339,- dan terealisasi sebesar Rp.449.882.632,- atau 96,58% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.86.221.531,- dan terealisasi sebesar Rp.83.486.282,- atau 96,83% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.190.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.437.675,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.902.600,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.660.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.

g. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.280.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

h. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.30.668.660.323,08 dan terealisasi sebesar Rp.27.702.622.641,95 atau 90,33% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.549.694.067,08 dan terealisasi sebesar Rp.4.189.746.558,- atau 92,09% dari alokasi anggaran.
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.26.118.966.256,- dan terealisasi



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

sebesar Rp.23.512.876.083,95 atau 90,02% dari alokasi anggaran.

9. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.29.994.000,- dan terealisasi sebesar Rp.29.792.000,- atau 99,33% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.673.476.000,- dan terealisasi sebesar Rp.627.566.000,- atau 93,18% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.431.692.103,- dan terealisasi sebesar Rp.345.167.000,- atau 79,96% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.330.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.328.895.000,- atau 99,51% dari alokasi anggaran.
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.101.192.103,- dan terealisasi sebesar Rp.16.272.000,- atau 16,08% dari alokasi anggaran.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.032.701.017,- dan terealisasi sebesar Rp.1.009.978.300,- atau 97,80% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.639.952.017,- dan terealisasi sebesar Rp.633.350.000,- atau 98,97% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.392.749.000,- dan terealisasi sebesar Rp.376.628.300,- atau 95,90% dari alokasi anggaran.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.588.609.223,- dan terealisasi sebesar Rp.4.403.991.384,- atau 95,98% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.391.556.118,- dan terealisasi sebesar Rp.301.800.685,- atau 77,08% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.364.752.000,- dan terealisasi sebesar Rp.355.148.403,- atau 97,37% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.832.301.105,- dan terealisasi sebesar Rp.3.747.042.296,- atau 97,78% dari alokasi anggaran.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.087.837.814,- dan terealisasi sebesar Rp.3.024.564.838,- atau 97,95% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.468.907.051,- dan terealisasi sebesar Rp.452.660.788,- atau 96,54% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.116.468.000,- dan terealisasi sebesar Rp.74.899.000,- atau 64,31% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.502.462.763,- dan terealisasi sebesar Rp.2.497.005.050,- atau 99,78% dari alokasi anggaran.

g. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.484.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.420.883.000,- atau 86,84% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Pembahasan Rancangan Perda, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.59.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.58.459.000,- atau 98,02% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.425.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.362.424.000,- atau 85,28% dari alokasi anggaran.

h. Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.16.497.948.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.716.147.821,- atau 83,14% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

i. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.919.973.429,- dan terealisasi sebesar Rp.5.551.156.000,- atau 93,77% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Kunjungan Kerja dalam Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.169.735.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.859.345.000,- atau 85,69% dari alokasi anggaran.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Pelaksanaan Reses, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.750.238.429,- dan terealisasi sebesar Rp.3.691.811.000,- atau 98,44% dari alokasi anggaran.

j. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.404.486.231,- dan terealisasi sebesar Rp.393.330.000,- atau 97,24% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi,.

k. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.57.899.995,- dan terealisasi sebesar Rp.44.399.200,- atau 76,68% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.

l. Layanan Administrasi DPRD

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.776.153.150,- dan terealisasi sebesar Rp.703.935.000,- atau 90,70% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.

3.1.4 RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

• Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa sebagai institusi yang menangani urusan pemerintahan umum telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program/kegiatan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 19 orang dengan 14 jabatan struktural yang diisi oleh 14 pejabat struktural. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, pencapaian urusan dapat terwujud.

• Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Tahun 2021

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.17.561.000,- dan terealisasi sebesar Rp.17.503.000,- atau 99,67% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.561.000,- dan terealisasi sebesar Rp.13.505.000,- atau 99,59% dari alokasi anggaran.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.998.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.311.750,- dan terealisasi sebesar Rp.12.299.750,- atau 99,90% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.10.400.000,- atau 80,00% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.313.518.129,- dan terealisasi sebesar Rp.313.438.129,- atau 99,97% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.194.629,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.430.500,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.200.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp.3.373.000,- atau 97,77% dari alokasi anggaran.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.288.243.000,- dan terealisasi sebesar Rp.288.240.000,- atau % dari alokasi anggaran.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.123.750,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.37.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp.36.525.000,- atau 96,40% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.40.755.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran yang terbagi dalam sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.125.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.630.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran.



h. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.32.850.000,- dan terealisasi 100% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter.

i. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp.69.180.000,- atau 85,85% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

j. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.740.250,- dan terealisasi sebesar Rp.4.240.250,- atau 89,45% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

k. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.35.695.000,- dan terealisasi sebesar Rp.34.295.000,- atau 96,08% dari alokasi anggaran melalui sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis merupakan suatu aturan – aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang tertuang dari beberapa misi sebagai berikut:



MISI 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

- 1) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan“, diterapkan:
Strategi 1 : Meningkatkan akses, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.
- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat“, diterapkan:
Strategi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.
- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah “, diterapkan:
Strategi 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

MISI 2: Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah“, diterapkan:
Strategi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata dan UMKM, pengembangan inovasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah“, diterapkan:
Strategi 5 : Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
- 6) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil, diterapkan:



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Strategi 6 : Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
- 7) Untuk mencapai sasaran “Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat”, diterapkan:
Strategi 7 : Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

- 8) Untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi“, diterapkan:
Strategi 8 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya.
- 9) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan”, diterapkan:
Strategi 9 : Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa dan pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri.
- 10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup“, diterapkan:
Strategi 10 : Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

MISI 4: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

- 11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik“, diterapkan:



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- Strategi 11 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
- 12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”, diterapkan:
- Strategi 12 : Meningkatkan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi dan komunikasi.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD, berupa catatan strategis sebagai masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menentukan kebijakan kedepan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

- Apresiasi atas kinerja pendapatan dimana pencapaian target melebihi dari yang direncanakan;
- Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif menggali potensi – potensi sumber PAD melalui pengkajian dan evaluasi terhadap sumber – sumber pendapatan baik pajak dan retribusi secara berkala;
- SKPD penanggung jawab pendapatan daerah diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat atau lembaga dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif.

2. Belanja Daerah

Penggunaan anggaran diprioritaskan pada penanganan COVID-19 serta dampak yang ditimbulkan berupa belanja kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi.

3. Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan)

Apresiasi diberikan pada Dinas Pendidikan atas prestasi yang telah diraih dalam bentuk penerimaan penghargaan.



- 4. Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf)**
 - a. Apresiasi atas beberapa prestasi yang telah diraih di bidang kesehatan;
 - b. Pembenahan dan perbaikan atas beberapa kerusakan gedung Rumah Sakit Syekh Yusuf akibat bencana;
 - c. Pengawasan terhadap pengadaan obat – obatan;
 - d. Pengawasan atas Industri Rumah Tangga yang mengelola makanan dan minuman bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM);
 - e. Peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
 - f. Pengawasan atas kinerja konsultan yang melaksanakan Pembangunan Puskesmas Sapaya.
- 5. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)**
 - a. Kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana) diperlukan pengawasan terhadap tenaga konstruksi, terutama untuk pekerjaan jalan, jembatan, bangunan sekolah, drainase, pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas, pedestrian serta gedung olahraga;
 - b. Dibutuhkan seleksi yang ketat atas penyedia jasa konstruksi dengan adanya penguatan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6. Urusan Sosial (Dinas Sosial)**
 - a. Pengawasan ketat atas pendataan dan pendistribusian Jaringan Pengaman Sosial (JPS) terhadap penerima manfaat;
 - b. Koordinasi dengan penegak hukum atas pelaporan kecurangan dan temuan atas pemanfaatan secara pribadi segala bentuk bantuan sosial.
- 7. Urusan Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)**

Pengkoordinasian terhadap upah minimum tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Gowa
- 8. Urusan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)**

Pengawasan dan penegakan atas pengelolaan limbah yang dilaksanakan oleh perusahaan dan penghentian aktivitas perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan serta peningkatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Gowa.
- 9. Urusan Penanaman Modal (Dinas Penanaman Modal dan PTSP)**

Pengawasan atas permohonan perizinan serta peningkatan promosi dan kerja sama investasi daerah.
- 10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Apresiasi atas perkembangan koperasi dan usaha mikro serta peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro seperti pelatihan, pendampingan hingga permodalan.
- 11. Urusan Pertanian (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura)**

Pengawasan atas penyediaan sarana pertanian (benih dan pupuk) serta penyediaan prasarana pertanian (alat pertanian) dalam rangka meningkatkan produktivitas di bidang pertanian.
- 12. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)**
 - a. Peningkatan promosi wisata dengan publikasi dan informasi objek wisata beserta inovasi dan atau atraksi pariwisata dengan bekerja sama dengan desa wisata dengan



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

melaksanakan inventarisasi terhadap potensi wisata yang ada di Kabupaten Gowa;

- b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) sebagai dokumen perencanaan kepariwisataan sehingga mampu menyusun kebijakan daerah khususnya di bidang kepariwisataan.
- c. Pengawasan atas kebersihan dan keindahan objek wisata.

13. Urusan Perdagangan (Dinas Perdagangan dan Perindustrian)

Peningkatan pengelolaan pasar dari segi kebersihan dan penataan pasar serta pengelolaan PAD dari pasar.

14. Urusan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Pengelolaan atas aset daerah yang dikelola oleh Bagian Umum dapat ditingkatkan lebih profesional.

15. Urusan Pengawasan Fungsi Penunjang Pemerintahan (Inspektorat)

- a. Peran Inspektorat dalam melakukan pengawasan khususnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk terus ditingkatkan;
- b. Inspektorat mengawasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan tenaga ahli bidang perencanaan didampingi oleh Inspektorat sehingga perencanaan dan penganggaran dapat berjalan dengan efisien dan efektif.



BAB IV

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

4.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam bentuk penyerahan tugas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara umum untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kabupaten Gowa.

Sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran yang bervariasi sesuai formula tersebut. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengalokasian dan penatausahaan program ini terletak pada 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa.

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten Gowa meliputi peningkatan usaha ekonomis produktif, pemeliharaan dan pemupukan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan stimulan gotong royong. Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan antara lain dengan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana serta dukungan ketersediaan operasional.

Adapun Tugas-tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2021, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tabel 4.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2021

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Kementerian Pertanian	TP (DIPA. 018.03.4.199125) Tanggal 29 Januari 2019	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 240.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
				Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier	Kab. Gowa	Rp.2.025.000.000,-	Rp.2.025.000.000,-
			Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
			Layanan Perkantoran	Layanan Dukungan Satker	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp. 100.000.000,-	Rp. 95.000.000,-
			Fasilitasi Pupuk dan Pesticida	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Kab. Gowa	Rp. 241.600.000,-	Rp. 241.600.000,-
				Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pesticida	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pesticida	Kab. Gowa	Rp. 136.730.000,-	Rp. 136.730.000,-
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Asuransi Pertanian	Asuransi Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 19.700.000,-	Rp. 16.700.000,-
			Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Optimasi Lahan	Optimasi Lahan	Kab. Gowa	Rp. 120.375.000,-	Rp. 120.375.000,-
				Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Kab. Gowa	Rp.2.842.500.000,-	Rp.2.842.500.000,-



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kinerja Tahun 2020 (DIPA. 018.08.199133/2020 Tgl 07 Januari 2020	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kab. Gowa	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
				Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Kab. Gowa	Rp. 16.500.000,-	Rp. 16.500.000,-
				Layanan Keuangan	Belanja Honor Operasional Satker	Kab. Gowa	Rp. 27.000.000,-	Rp. 27.000.000,-
				Pasca Panen, Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan, Pembinaan, Monev Sarana Pasca Panen	Kab. Gowa	Rp. 14.060.000,-	Rp. 14.060.000,-
4	Kementerian Ketenagakerjaan	Tugas Pembantuan DIPA- 026.13.2.452652/2021 Tanggal 23 November 2020	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Binalattas	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gowa	Rp. 564.404.000,-	Rp.550.355.500,-
5	Kementerian Perdagangan	SP DIPA- 090.02.4.190244/2021	Peningkatan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Rakyat Sapaya Kec. Bungaya	Rp.6.000.0000.000,-	Rp.5.703.543.600,-



4.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang melaksanakan.

4.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

- a. Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB V P E N U T U P

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam tahun 2021.

Sebagai output penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa yakni hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur pemerintah daerah. Keberhasilan yang telah dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi dari semua komponen Pemerintahan Daerah, yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga kondisi tersebut akan membentuk *check and balances* yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Gowa dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada periode kepemimpinan kami, patut disyukuri mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi komitmen perencanaan pemerintah sekaligus tolok ukur untuk mendorong kinerja aparat pemerintah daerah untuk semakin baik dan semakin berkualitas.

Dibalik semua capaian kinerja yang telah dihasilkan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi sumber daya maupun faktor-faktor lainnya di luar jangkauan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gowa. Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan untuk pencapaian seluruh indikator yang menjadi target pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2021, yang pada akhirnya semua capaian indikator tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gowa.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun tersebut masih terdapat banyak keterbatasan, oleh karenanya semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi catatan yang bermanfaat dan menjadi umpan balik untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun-tahun mendatang.



Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan Nya kepada kita sekalian.

BUPATI GOWA,

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH.